

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Perkara Cerai Gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR”, dengan latar belakang bahwa sistem pembuktian perdata, sudah beralih kepada kebenaran materiil, artinya walaupun alat bukti secara formal telah mencukupi, hakim tidak boleh memutuskan kalau tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara materiil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara obyektif dan menganalisis pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR. Kemudian untuk mengetahui secara obyektif dan menganalisis pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR. Terakhir untuk mengetahui secara obyektif analisis hukum Islam tentang pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR.

Tipe penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti putusan Pengadilan Agama Pekanbaru perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR serta bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR adalah sistem pembuktian secara formal. Dimana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti formal semata. Padahal dalam putusan Mahkamah Agung No. 3136K/Pdt.1983 dikatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Dalam pandangan ahli juga demikian sebagaimana dikemukakan Roihan A Rasyid, “sistem pembuktian yang mendasarkan pada kebenaran formal itu sudah lama ditinggalkan karena keperluan hukum dan praktik penyelenggaraan peradilan dan aliran kebenaran formal juga sudah beralih kepada kebenaran materiil.

Pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR dapat dikatakan tidak cukup pertimbangan karena tidak ada analisis yang jelas berdasarkan hukum pembuktian, diantaranya apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, dan sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. Putusan yang tidak cukup pertimbangan bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBg dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama.

Analisis hukum Islam tentang pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR, bahwa sistem pembuktian dalam hukum Islam juga tidak berdasarkan kebenaran formal. Pembuktian perkara perdata menurut hukum Islam lebih menekankan kepada kebenaran materiil. Keadaan ini sangat berbeda dengan yang terjadi dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Meskipun perceraian dengan suami pertama tidak pernah diputuskan melalui

Pengadilan Agama sebagaimana didalilkan oleh Pemohon berikut bukti-bukti surat yang diajukannya, namun Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa alat bukti T. 3 sampai dengan bukti T. 12 dipandang tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon. Padahal dilihat dari segi syarat formil dan materil kedua alat bukti itu, telah terpenuhi. Dimana alat bukti T.11 tersebut merupakan akta bukti surat otentik yang dikeluarkan pemerintah. Keadaan ini sejalan dengan ketentuan hukum Islam dimana dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah langsung dapat dijadikan sebagai bukti. Apalagi Termohon tidak dapat mematahkan alat bukti tersebut dengan bukti lawan yang rupa setara dan sempurna. Oleh karena itu, bila dilihat dari alat bukti yang diajukan Pemohon secara formal dan materiil cukup untuk mengoyahkan alat bukti P. 2 atau mematahkan alat bukti formal dari pihak lawan. Sehingga hubungan perkawinan antara Termohon dan Pemohon seharusnya menjadi cacat sebagaimana dalil yang dipertahankan oleh Pemohon dalam perlawannya. Memang, kelemahan dari dalil Pemohon bukan dari alat bukti yang diajukannya, melainkan dalil itu tidak tepat dipertahankan dalam perkara aqou. Mengapa? sebab untuk menyatakan perkawinannya tidak sah atau cacat hukum menurut hukum yang berlaku di Indonesia harus diajukan pembatalan perkawinan dan terpisah dari perkara yang sedang disengketakan.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG SISTEM	
PEMBUKTIAN.....	16
A. Asas, dan Sistem Pembuktian.....	16
B. Klasifikasi Kekuatan Pembuktian yang Melekat pada setiap Alat Bukti dikaitkan Batas Minimal Pembuktian.....	22
 BAB III PELAKSANAAN SISTEM PEMBUKTIAN DI	
PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA NOMOR	
0735/PDT.G/2008/PA/PBR.....	32
A. Pelaksanaan Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Perkara Cerai Gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR.....	32
B. Pertimbangan Hukum yang dibuat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Cerai Gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR.....	46
C. Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Perkara Cerai Gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR.....	53
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	 72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	79
 DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat dan tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Entitas pengadilan sejatinya memberi pencerahan bagi perjalanan komunitas bangsa manusia.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan peradilan di Indonesia guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, menurut Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di atas, Peradilan Agama adalah peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam untuk mencari keadilan mengenai perkara perdata tertentu. Terhadap perkara perdata

tertentu tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah. Semenjak berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan Pengadilan Agama bertambah dengan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama terhadap perkara dalam ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam ekonomi syari'ah.

Penyelesaian masalah hukum dikalangan orang-orang Islam dalam perkara perdata tertentu di atas, yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sejatinya harus merupakan puncak kearifan, sehingga para pencari keadilan dapat merasakan keadilan yang optimal.

Hukum acara di Pengadilan Agama pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan dengan hukum acara di Pengadilan Umum, hal tersebut sebagaimana diatur Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagai berikut: "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".

Mengenai sistem pembuktian, secara khusus tidak ada diatur dalam undang-undang Pengadilan Agama, baik UU No. 7 Tahun 1989 maupun UU No. 3 Tahun 2006. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 di atas, maka sistem pembuktian di Pengadilan Agama

dilaksanakan sebagaimana sistem pembuktian yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Hukum pembuktian yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Umum ditemui dalam HIR, RBg, BRv dan BW selain itu dapat ditemukan dalam yurisprudensi berarti bahwa HIR, RBg, BRv dan BW juga yurisprudensi, berlaku juga bagi Peradilan Agama.¹

Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara itu mengabdikan ke dan untuk terwujudnya hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama, dengan kata lain, bagaimanapun wujudnya acara itu adalah tetap harus demi dan untuk tegak dan terpeliharanya hukum materiil Islam.

Biasanya dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim, masing-masing pihak akan selalu memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau “diktum” putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan.

Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa sistem hukum acara perdata menurut HIR/RBg hanya mendasarkan kepada kebenaran formal, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah diatur dalam HIR/RBg. Karena itulah sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formal itu.

¹Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. ke-3. h. 143.

Menurut Subekti, dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.²

Roihan A Rasyid, mengatakan sistem pembuktian yang mendasarkan pada kebenaran formal itu sudah lama ditinggalkan karena keperluan hukum dan praktik penyelenggaraan peradilan, sehingga dipakailah hukum acara perdata yang bukan hanya terdapat di dalam HIR/RBg tetapi juga yang terdapat di dalam BW, Rsv (*Reglement op de Rechtsvordering*), dan kebiasaan-kebiasaan praktik penyelenggaraan peradilan, termasuk Surat-surat Edaran serta Petunjuk dari Mahkamah Agung”.³

Selain daripada itu, menurut Roihan A Rasyid, aliran kebenaran formal juga sudah beralih kepada kebenaran materiil, artinya walaupun alat bukti secara formal telah mencukupi, hakim tidak boleh memutus kalau tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara materiil. Aliran yang disebutkan terakhir ini dahulunya dianut dalam hukum acara pidana saja.⁴

Menelusuri pandangan ahli hukum perdata lainnya, seperti M. Yahya Harahap pada intinya sejalan dengan apa yang dikemukakan Roihan A Rasyid di atas. Menurut M. Yahya Harahap bahwa :

“Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak

²R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), Cet. ke-6, h. 107.

³Roihan A Rasyid, *Hukum Acara...Op.Cit.*, h. 148.

⁴*Ibid.*

dipersidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 3136 K/Pdt/1983, yang mengatakan tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.

Apakah hakim dilarang mencari kebenaran materiil? Tidak! Asal kebenaran itu ditegaskan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Hal itu dapat disimak dalam putusan MA No. 1071 K/Pdt/1984, yang berpendapat bahwa, keyakinan PT yang membenarkan bahwa penggugat tidak ditodong dengan senjata api pada saat menandatangani kertas kosong yang ternyata menjelma menjadi surat perjanjian jual beli, dapat dibenarkan dengan ketentuan asal keyakinan itu berpijak di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi batas minimal pembuktian. Ternyata keyakinan itu disimpulkan PT berdasar keterangan saksi-saksi, dengan demikian keyakinan itu diambil PT berdasar alat bukti yang sah. Jadi kalau yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegaskan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya kalau hakim tidak yakin, asal yang berpekara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran, meskipun kualitasnya hanya bersifat kebenaran formil”.⁵

Berdasarkan hal di atas, menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam perkara perdata tidak lagi mendasarkan kepada kebenaran formal tetapi sudah mengarah pada kebenaran materiil. Sehubungan dengan itu, lebih lanjut Roihan A Rasyid menjelaskan bahwa ”di muka Peradilan Agama, ada suatu hal yang perlu diingat, yaitu sekalipun secara formal menurut HIR/RBg dan lain sebagainya itu sudah dianggap cukup secara formal terbukti, hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin benar secara materiil menurut hukum Islam”.

Mengingat pembuktian secara formal sudah menjadi kelaziman bagi hakim untuk menilai pembuktian dalam praktik peradilan sehingga pembuktian formal tidaklah menimbulkan keraguan dalam praktiknya, tetapi

⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2006), Cet. ke-4, hal. 498.

suatu hal yang memunculkan pertanyaan apakah dalam praktik Pengadilan Agama sudahkah menerapkan pembuktian secara materiil pada perkara-perkara yang ditangani?

Penulis mengambil contoh dalam salah satu Putusan Pengadilan Agama, yakni putusan verstek Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat tertanggal 03 Desember 2008 jo putusan verzet Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0735/PDT.G/2008/ PA/PBR tertanggal 22 April 2009 antara Penggugat/Termohon Lismarinda Binti Masri M lawan Tergugat/Pemohon Rizky Syarifuddin Bin Syarifuddin Adek. Dalam dalil Tergugat/Pemohon terlihat adanya dalil yang mengatakan bahwa Penggugat/Termohon telah memasukkan keterangan palsu dalam akta nikah, tetapi dalam perkara aquo majelis hakim menerima akta nikah yang diajukan Penggugat/Pemohon sebagai alat bukti tanpa memberikan kesempatan pembuktian secara materiil. Selanjutnya, bila diperhatikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo khususnya terkait dengan dalil Tergugat/Pemohon di atas, sama sekali majelis hakim tidak ada membuat pertimbangan hukum. Semestinya, selain harus ada membuat pertimbangan hukum, majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo juga harus memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pemohon untuk membuktikannya secara materiil tentang adanya keterangan palsu tersebut, misalnya dengan memeriksa saksi yang dapat menguatkan adanya keterangan palsu dimaksud. Berkenaan dengan itu, maka diduga sistem pembuktian secara materiil sama sekali belum diterapkan oleh majelis hakim

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat tersebut.

Selain belum diterapkan sistem pembuktian secara materiil dalam perkara cerai gugat tersebut, penulis juga mengamati beberapa kejanggalan lainnya dalam putusan perkara tersebut, terutama berkaitan dengan pertimbangan hukum. Menurut M. Yahya Harahap, pertimbangan hukum dalam suatu putusan merupakan jiwa dan intisari putusan. Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap, dalam pertimbangan hukum dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian, diantaranya :

- “1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil;
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak”.⁶

Pertimbangan hukum dalam putusan verstek Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat jo putusan verzet Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0735/PDT.G/2008/ PA/PBR, akan tampak kejanggalannya jika dihubungkan dengan pendapat ahli di atas, beberapa diantaranya:

1. Tidak ada pertimbangan hukum terkait bantahan Tergugat/Pemohon bahwa Penggugat/Termohon masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan suami pertama yang memiliki akta nikah dan belum ada perceraian melalui Pengadilan Agama (lihat dalam tambahan verzet poin 5 dari Tergugat/Pemohon). Terhadap hal ini Tergugat/Pemohon telah mengajukan dua buah alat bukti tertulis yang dapat diperlihatkan aslinya

⁶*Ibid*, h. 809.

sebaliknya Pengugat/Termohon tidak dapat melumpuhkan alat bukti tersebut;

2. Tidak ada pertimbangan hukum terkait sanggahan dari Tergugat/Pemohon bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat/Termohon telah memberikan keterangan palsu (lihat dalam tambahan verzet poin 5 dari Tergugat/Pemohon);
3. Tidak ada pertimbangan hukum terkait sanggahan dari Tergugat/Pemohon bahwa KTP dan akta nikah yang dijadikan alat bukti oleh Penggugat/Termohon menurut sanggahan dari Tergugat/Pemohon berisi keterangan palsu dan harus dikesampingkan menjadi alat bukti karena masih terikat perkawinan dengan suami pertama yang berhasil dibuktikan Tergugat/Pemohon dengan dua alat bukti surat yakni akta nikah dari suami pertama yang belum ada perceraian melalui Pengadilan Agama yang dapat diperlihatkan aslinya, kemudian surat pernyataan dari suami pertama yang juga dapat diperlihatkan aslinya. Sebaliknya Pengugat/Termohon tidak dapat melumpuhkan alat bukti tersebut;
4. Tidak ada pertimbangan hukum terkait bantahan dari Tergugat/Pemohon bahwa mengenai hak hadhanah anak, meskipun menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak di bawah usia 12 tahun adalah hak ibunya mengingat Penggugat/Termohon seorang tuna rungu dan tuna wicara bantahan-bantahan Tergugat/Pemohon mengenai hak hadhanah sebaiknya dapat dipertimbangkan.

Apa yang terurai di atas, lebih lanjut menurut penulis akan lebih menarik jika ditelaah secara hukum karena memuat suatu fenomena pelaksanaan sistem pembuktian termasuk dalam membuat pertimbangan hukum.

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru di atas, maka pelaksanaan sistem pembuktian yang diterapkan hakim dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru menurut penulis merupakan hal yang menarik untuk dikaji secara akademik, yang akan dirangkum dalam bentuk skripsi dan diberi judul “Pelaksanaan Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 0735/PDT.G/2008/PA/PBR”.

B. Perumusan Masalah

Demi terarahnya penelitian, di bawah ini penulis kemukakan 3 (tiga) perumusan masalah guna dicari jawaban dan pemecahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan. Adapun batasan masalah penelitian ini fokus pada pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR, pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR dan analisis hukum Islam tentang pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui secara obyektif dan menganalisis pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR?
- b. Untuk mengetahui secara obyektif dan menganalisis pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR?
- c. Untuk mengetahui secara obyektif analisis hukum Islam tentang pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Dapat menambah pengetahuan penulis tentang pelaksanaan sistem pembuktian dalam kasus yang diteliti, di samping itu dalam prespektif akademis, sebagai syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah UIN SUSKA Pekanbaru.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca yang ingin mempelajari pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama, di samping berguna bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian serupa.
- c. Prespektif praktis, jika dianggap layak dapat dijadikan bahan masukan serta referensi bagi masyarakat luas yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama.

E. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR serta bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Subyek dan obyek

Adapun yang menjadi obyek dari penelitian ini sistem pembuktian yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama sebanyak satu kasus yang telah

diputus, maka penulis tidak menggunakan sampel. Sedangkan subyek penelitian ini adalah pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR, pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR dan analisis hukum Islam tentang pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR.

3. Sumber data

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tipe penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber datanya merupakan data sekunder yang dilakukan dengan cara meneliti putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti

4. Teknik pengumpulan data

Berkaitan dengan tipe penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni peran aktif penulis untuk mempelajari putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode penulisan

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulisan dapat dikumpulkan, maka penulis membahas dengan cara sebagai berikut :

a. Metode deduktif

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode deskriptif analitik

Metode ini adalah suatu cara mengumpulkan data yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dilukiskan secara sistematis.

6. Metode analisa data

Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan masalah pokok dan untuk seterusnya disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan dimengerti, kemudian data tersebut dibandingkan atau diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat rencana penulisan dalam skripsi nanti dengan demikian akan tergambar sistematika penulisannya mulai dari

pendahuluan hingga penutup. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang relevan dan mendukung permasalahan yang hendak diteliti antara lain : Pengertian, Asas, dan Sistem Pembuktian, serta Klasifikasi Kekuatan Pembuktian yang Melekat pada setiap Alat Bukti dikaitkan Batas Minimal Pembuktian.

BAB III PELAKSANAAN SISTEM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DALAM PERKARA CERAH GUGAT NOMOR 0735 / PD.G/2008/PA/PEKAMBARU

Bab ini akan menganalisis permasalahan yang diteliti yakni : *Pertama*, pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR; *Kedua*, pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR; dan *Ketiga*, analisis hukum Islam tentang pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan serta mengajukan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SISTEM PEMBUKTIAN

A. Asas dan Sistem Pembuktian

1. Asas pembuktian

Sebagai pedoman atau aturan umum digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 BW, yang berbunyi:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu, hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.¹

Barangkali tidak ada bedanya dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 163 HIR, yang berbunyi:

”Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.²

Inti pokok dari pasal-pasal di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu;

¹R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata edisi Revisi dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), Cet. ke-10, h. 475.

²HIR Pasal 163 dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...Op.Cit.*, h. 523.

Siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu;

- b. Sebaliknya, siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut.

Atau secara teknis yustisial, dapat diringkas:

- a. Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya; dan
- b. Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud.

Inti pokok dari pasal-pasal di atas dan secara teknis yustisial tersebut adalah pedoman pembebanan pembuktian yang digariskan undang-undang. Pedoman ini, merupakan landasan ketentuan umum dalam menerapkan pembagian beban pembuktian. Berpedoman pada ketentuan di atas, maka baik Penggugat atau Tergugat dapat dibebani pembuktian. Perlu diingat oleh hakim dalam pembuktian adalah bahwa seseorang tidak selalu dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Membuktikan tidak selalu mudah, terutama membuktikan sesuatu yang bersifat negatif. Misalnya tidak menerima uang, tidak berutang dan sebagainya. Segala sesuatu yang bersifat tidak, pada umumnya sukar atau ada kemungkinan tidak bisa dibuktikan. Memberi beban bukti kepada salah satu pihak dalam proses dapat dianggap sedikit banyak (menabur) rugi pada pihak yang

dibebani wajib bukti, karena dalam hal yang bersangkutan tidak berhasil dengan pembuktiannya ia akan dikalahkan (resiko pembuktian).³

Berhubung dengan itu menurut Hari Sasangka adil jika beban pembuktian itu dipikulkan kepada pihak yang paling sedikit dirugikan. Resiko dalam pembuktian tidak boleh berat sebelah, hakim harus adil dan menentukan beban pembuktian itu dengan memperhatikan keadaan konkrit.⁴

Malikul Adil dalam bukunya *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, mengatakan:

“Hakim yang insyaf akan kedudukannya tidak akan lupa bahwa di dalam membagi-bagi beban pembuktian, harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan yang tidak dapat dibuktikan”.⁵

Selanjutnya, menurut Munir Fuady mengalokasikan beban pembuktian, beberapa arahan yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

- a. Secara keseluruhan, alokasi pembuktian harus adil sehingga tidak berat sebelah;
- b. Pengalokasian beban pembuktian harus dilakukan dengan mengindahkan asas-asas kepatutan;
- c. Beban pembuktian harus dibagi secara proporsional;
- d. Secara garis besar, penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan tergugat wajib membuktikan bantahannya;
- e. Beban pembuktian dipikulkan ke pundak yang mendalilkan suatu hak atau yang menyangkal suatu hak yang telah dibuktikan atau yang tidak perlu dibuktikan;
- f. Dalam hal praduga hukum, beban pembuktian dipikulkan kepada pihak yang telah ditentukan dengan tegas oleh hukum substantif, dengan atau tanpa hak untuk membuktikan sebaliknya;

³R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), Cet. ke-6, h. 19.

⁴Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Berperkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), Cet. ke-1, h. 31.

⁵Malikul Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata*, dalam R. Subekti, *Hukum...Op.Cit.*, h. 85.

- g. Dalam hal berlaku sistem pembuktian terbalik, beban pembuktian dipikulkan kepada pihak tergugat, atau kepada pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- h. Beban pembuktian dibebankan kepada yang paling memungkinkan untuk membuktikan (paling mungkin memiliki alat bukti);
- i. Beban pembuktian dipikulkan kepada yang paling kecil mengalami risiko dalam hal gagal bukti.⁶

Berdasarkan penerapan pembagian beban pembuktian tersebut, diperlukan apabila para pihak yang berperkara saling mempersengketakan dalil gugatan yang diajukan penggugat. Akan tetapi, jika para pihak memperoleh kesepakatan atau pihak lain mengakui apa yang disengketakan, pedoman pembagian beban pembuktian yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR tidak memiliki urgensi dan relevansi lagi, karena tidak ada lagi hak atau kepentingan yang perlu dibuktikan.

2. Sistem pembuktian

Sistem (dari bahasa Inggris, *system*) artinya suatu rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebulatan (kesatuan) untuk melaksanakan sesuatu fungsi.⁷ Jadi pengertiannya sama sekali lain dengan sistem (dari bahasa Belanda *sisteen*) yang artinya cara.

Sebagaimana sudah dimaklumi bahwa sistem hukum acara perdata menurut HIR/RBg adalah mendasarkan kepada kebenaran formal, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat mutlak

⁶Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006,) Cet. ke-1, h. 50.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1993), Edisi ke-4, h. 110.

kepada cara-cara tertentu yang telah diatur dalam HIR/RBg. Karena itulah sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formal itu.

Menurut Subekti, dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.⁸

Menelusuri pandangan ahli hukum perdata lainnya, seperti M. Yahya Harahap mengemukakan sebagai berikut :

“Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak dipersidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 3136 K/Pdt/1983, yang mengatakan tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Apakah hakim dilarang mencari kebenaran materiil? Tidak! Asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Hal itu dapat disimak dalam putusan MA No. 1071 K/Pdt/1984, yang berpendapat bahwa, keyakinan PT yang membenarkan bahwa penggugat tidak ditodong dengan senjata api pada saat menandatangani kertas kosong yang ternyata menjelma menjadi surat perjanjian jual beli, dapat dibenarkan dengan ketentuan asal keyakinan itu berpijak di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi batas minimal pembuktian. Ternyata keyakinan itu disimpulkan PT berdasar keterangan saksi-saksi, dengan demikian keyakinan itu diambil PT berdasar alat bukti yang sah. Jadi kalau yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya kalau hakim tidak yakin, asal yang berpekara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran, meskipun kualitasnya hanya bersifat kebenaran formil”.⁹

⁸R. Subekti, R. Subekti, *Hukum...Op.Cit.*, h. 107.

⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...Op.Cit.*, h. 498.

Sejalan dengan pendapat di atas, Roihan A Rasyid, mengatakan sistem pembuktian yang mendasarkan pada kebenaran formal itu sudah lama ditinggalkan karena keperluan hukum dan praktik penyelenggaraan peradilan, sehingga dipakailah hukum acara perdata yang bukan hanya terdapat di dalam HIR/RBg tetapi juga yang terdapat di dalam BW, *Reglement op de Rechtsvordering* (Rsv), dan kebiasaan-kebiasaan praktik penyelenggaraan peradilan, termasuk Surat-surat Edaran serta Petunjuk dari Mahkamah Agung”.¹⁰

Selain dari pada itu, menurut Roihan A Rasyid, aliran kebenaran formal juga sudah beralih kepada kebenaran materiil, artinya walaupun alat bukti secara formal telah mencukupi, hakim tidak boleh memutus kalau tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara materiil. Aliran yang disebutkan terakhir ini dahulunya dianut dalam hukum acara pidana saja.¹¹

Lebih lanjut Roihan A Rasyid menambahkan suatu hal yang perlu diingat di muka Peradilan Agama, yaitu sekalipun secara formal menurut HIR/RBg dan lain sebagainya itu sudah dianggap cukup secara formal terbukti, hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin benar secara material menurut hukum Islam.¹²

Pergeseran sistem kebenaran formal menuju kepada kebenaran material ini pernah pula ditegaskan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam Rapat Kerja di Jakarta, 28-29 Mei 1981.

¹⁰Roihan A Rasyid, *Hukum Acara...Op.Cit.*, h. 147.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, h. 148.

Berdasarkan hal di atas teori menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara perdata tidak lagi mendasarkan kepada kebenaran formal tetapi sudah mengarah pada kebenaran materiil.

B. Klasifikasi Kekuatan Pembuktian yang Melekat pada setiap Alat Bukti dikaitkan Batas Minimal Pembuktian

Menurut acara perdata, setiap alat bukti memiliki batas minimal pembuktian yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Begitu juga nilai kekuatan yang melekat pada masing-masing alat bukti, tidak sama. Berikut ini akan dijelaskan klasifikasi nilai kekuatan yang melekat pada setiap alat bukti dihubungkan dengan batas minimal yang terdapat pada masing-masing alat bukti.

1. Alat bukti surat

Alat bukti surat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Akta otentik;
- b. Akta bawah tangan; dan
- c. Akta sepihak atau pengakuan sepihak.¹³

Klasifikasi nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat (akta) berdasar sumber aslinya, terdapat perbedaan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing jenis akta. Jadi, meskipun ketiga jenis alat bukti itu sama-sama berada dan digolongkan dalam satu rumpun, namun kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing akta tidak sama. Tetapi berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan

¹³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...Op.Cit.*, h. 545.

spesifikasi bentuknya. Namun demikian, dimungkinkan pada ketiga jenis itu akan melekat nilai kekuatan pembuktian yang sama bobotnya, apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu.

Jadi, pada dasarnya tidak sama nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik (selanjutnya ditulis AO) dengan akta bawah tangan (selanjutnya ABT) atau akta sepihak, karena undang-undang sendiri membedakannya. Akibat lanjut dari perbedaan nilai kekuatan pembuktian itu, memengaruhi juga minimal yang harus dipenuhi masing-masing.

a. Nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta AO

1). Nilai kekuatan AO

Nilai kekuatan pembuktiannya diatur dalam Pasal 1870 BW, Pasal 285 RBg. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah sempurna, dan mengikat. Hal tersebut apabila alat bukti AO yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai fakta sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.

2). Batas minimal pembuktian AO

Mengenai batas minimal pembuktian AO dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain. Dengan demikian, secara berdiri sendiri alat bukti AO dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian. Namun demikian, nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta batas minimalnya bisa berubah disebabkan:

- a). Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);
- b). Bukti lawan tersebut demikian rupa setara dan sempurna sehingga mampu menggoyahkan eksistensi AO yang bersangkutan;
- c). Tidak sempurna dan mengikat lagi;

- d). Tetapi merosot menjadi bukti permulaan tulisan, sehingga tidak lagi berdiri sendiri tetapi harus dibantu dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti lain”.¹⁴

Demikianlah sistem dan prinsip yang harus diterapkan dalam menentukan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian yang melekat pada alat bukti AO.

b. Nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian ABT

1). Nilai kekuatan ABT

Agar pada ABT melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materil, yakni :

- a). ABT dibuat sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
- b). ABT ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
- c). Isi dan tanda tangan diakui”.¹⁵

Kalau syarat di atas dipenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 BW, Pasal 288 RBg, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan AO. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat.

2). Batas minimal pembuktian ABT

Apabila keberadaannya sempurna memenuhi syarat formil dan materil, selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian, yakni mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian.

3). Nilai kekuatan dan batas minimal ABT dapat berubah

Ada dua faktor yang dapat mengubah dan memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian ABT, yakni:

- a). Terhadap ABT diajukan bukti lawan;
- b). Isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

Terhadap kasus yang demikian, terjadi perubahan yang sangat substansial, yakni nilai kekuatan pembuktian yang melekat

¹⁴Subekti, R. Subekti, *Hukum...Op.Cit.*, h. 27.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...Op.Cit.*, h. 546.

padanya, jatuh menjadi bukti permulaan tulisan. Sedangkan batas minimalnya berubah menjadi alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan tambahan dan salah satu alat bukti yang lain”.¹⁶

- c. Nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta sepihak
Akta sepihak diatur dalam Pasal 1878 BW, Pasal 291 RBg. Agar alat ini sah sebagai alat bukti, mesti memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil adalah dibuat atau ditulis tangan sendiri oleh penandatanganan dan memuat tanda tangan pembuat. Sedangkan syarat materil adalah memuat pengakuan utang atau penyerahan barang dan jumlahnya tertentu (*fixed*) atau barang tertentu.

1). Nilai kekuatan pembuktiannya

Kalau syarat formil dan materil terpenuhi, kemudian isi dan tanda tangan diakui pembuat, maka kekuatan pembuktian yang melekat pada akta sepihak tersebut sama nilai kekuatan pembuktiannya dengan akta otektik. Dengan demikian mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

2). Batas minimal pembuktiannya

Sama dengan batas minimal AO dan ABT. Sempurna dan berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain.

3). Batas minimal pembuktiannya dapat merosot

Sama halnya dengan AO dan ABT, akta ini pun dapat merosot nilai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya. Faktor yang dapat memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya, yakni dilumpuhkan dengan bukti lawan dan isi dan tanda tangan diingkari pembuat. Dalam kasus yang seperti itu, kedudukan atau eksistensi dan kualitasnya merosot menjadi bukti-bukti permulaan tulisan, tidak lagi memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan batas minimalnya merosot, sehingga tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan bantuan salah satu alat bukti lainnya.¹⁷

2. Alat bukti saksi

a. Nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas, disimpulkan dari Pasal 1908 BW, Pasal 172 HIR. Menurut pasal

¹⁶*Ibid*, h. 547.

¹⁷*Ibid*, h. 547-548.

tersebut hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan yang lain. Jadi berbeda dengan alat bukti akta, memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah:

“Kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat dan hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya; dengan demikian, hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian”.¹⁸

b. Batas minimal pembuktiannya

Bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas yang digariskan Pasal 1908 BW, Pasal 172 HIR, dihubungkan dengan Pasal 1905 BW, Pasal 169 HIR, undang-undang sendiri telah menentukan batas minimal pembuktiannya:

- 1). *Unus testis nullus testis*
Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1905 BW, Pasal 169 HIR, bahwa seorang saksi bukan kesaksian. Berarti seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian.
- 2). Paling sedikit 2 (dua) orang saksi
Jika alat bukti yang hendak diajukan terdiri dari saksi, maka bertitik tolak dari ketentuan Pasal 169 HIR, agar tercapai batas minimal pembuktian saksi yang akan dihadirkan di persidangan, paling sedikit dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil.
- 3). Paling sedikit satu orang saksi, ditambah satu alat bukti yang lain
Penggarisan ini dijelaskan sendiri oleh Pasal 1905 BW, Pasal 169 HIR, yang mengatakan, keterangan seorang saksi saja tanpa

¹⁸*Ibid*, h. 548.

bantuan alat bukti lain di depan sidang, tidak boleh dipercaya, karena tidak mencapai batas minimal pembuktian.¹⁹

3. Alat bukti pengakuan

a. Nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian pengakuan

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 1925 BW, Pasal 174 HIR. Secara umum dan garis besarnya, nilai kekuatan atas minimal pembuktiannya dapat dikemukakan dalam uraian di bawah ini :

1). Pengakuan murni dan bulat

Pengakuan yang dianggap bersifat murni dan adalah pengakuan secara tegas tanpa syarat atau klausul, diam tanpa pengingkaran (tanpa jawaban) dan pengingkaran tanpa alasan.

Apabila terjadi pengakuan yang demikian, dalam arti pengakuan itu memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 1925 BW, Pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang : sempurna, mengikat, dan menentukan. Berarti pada pengakuan yang murni diucapkan dalam persidangan (baik dengan lisan atau tulisan), mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan memaksa.

Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni: merupakan kekuatan yang bersifat mutlak, para pihak dan hakim, terikat untuk menerima kebenaran tersebut, oleh karena itu, hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil putusan.

2). Nilai kekuatan mengikatnya

Selain nilai kekuatan pembuktian yang digariskan Pasal 1925 BW, Pasal 174 HIR, diatur lagi nilai kekuatan mengikatnya dalam Pasal 1926 BW yang menegaskan: pengakuan yang diberikan di depan sidang, tidak dapat dicabut kembali, pencabutan hanya dimungkinkan, apabila yang bersangkutan dapat membuktikan pengakuan itu merupakan akibat kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

3). Batas minimal pengakuan murni

Sesuai dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, menjadikan eksistensi alat bukti pengakuan itu: mampu berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain,

¹⁹*Ibid*, h. 548-549.

berarti pada dirinya sendiri sudah tercapai batas minimal pembuktian tanpa didukung alat bukti lain. Selain itu, terhadap alat bukti pengakuan tidak ada ruang mengajukan bukti lawan, karena mana mungkin pihak yang mengaku melawan sendiri pengakuan yang diberikannya.²⁰

b. Kekuatan dan batas minimal pembuktian pengakuan berklausul

Bentuk pengakuan ini diatur dalam Pasal 1924 BW, Pasal 176 HIR.

1). Nilai kekuatan pembuktiannya

Menurut pasal tersebut, terhadapnya harus ditegakkan prinsip tidak boleh dipecah. Hakim tidak boleh menerima sebagian yang menguntungkan pihak lain dan menolak pengakuan yang merugikan pihak yang mengaku, tetapi pengakuan berklausul itu harus diterima secara keseluruhan, untuk selanjutnya dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim dengan saksama. Dengan demikian, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, tidak sempurna dan tidak mengikat, malahan sifat kekuatan pembuktiannya, hanya berkualitas sebagai alat bukti permulaan.

2). Batas minimal pembuktiannya

Kualitas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan berklausul, hanya sebagai alat bukti permulaan. Jika nilai kekuatan tersebut dihubungkan dengan batas minimal pembuktian, berarti alat bukti ini, tidak mampu berdiri sendiri sebagai alat bukti. Oleh karena itu, agar pada dirinya tercapai batas minimal pembuktian, harus dibantu dan didukung paling sedikit salah satu alat bukti yang lain.²¹

4. Alat bukti persangkaan

Kekuatan pembuktian alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 1916 dan 1922 BW, Pasal 173 HIR. Menurut ketentuan tersebut, dikenal dua bentuk alat bukti persangkaan.

a. Nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian persangkaan

Menurut Pasal 1916 BW, persangkaan undang-undang adalah persangkaan berdasar suatu ketentuan pasal khusus undang-undang berkaitan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena dasar pembuktian alat bukti ini bersumber dari undang-undang sendiri, pada prinsipnya nilai kekuatan pembuktian yang melekat bersifat sempurna,

²⁰*Ibid*, h. 549-550.

²¹*Ibid*, h. 550-551.

mengikat, dan memaksa. Oleh karena itu, kebenaran yang melekat pada alat bukti ini, bersifat imperatif bagi hakim untuk dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Akan tetapi perlu diingat, sifat nilai kekuatan pembuktian yang hanya berlaku pada persangkaan menurut undang-undang yang tidak dapat dibantah, sifat nilai kekuatannya tidak absolut karena dapat dibantah dengan bukti lawan.²²

b. Batas minimal pembuktian

Oleh karena pada alat bukti ini melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka dapat disimpulkan alat bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Berarti, pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian. Namun di sini pun perlu diingat. Sepanjang mengenai alat bukti persangkaan menurut undang-undang yang dapat disangkal, batas minimalnya bisa merosot apabila terhadapnya diajukan bukti lawan yang mampu melumpuhkan eksistensinya. Dalam hal yang seperti itu nilai kekuatan pembuktiannya turun menjadi alat bukti permulaan, berarti dalam hal yang seperti itu, dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus mendapat dukungan alat bukti lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian.²³

5. Alat bukti sumpah

Berdasar Pasal 1929 BW, Pasal 177 HIR, terdapat dua bentuk alat bukti sumpah yakni sumpah menentukan dan sumpah tambahan. Pada dasarnya nilai kekuatan pembuktiannya sama, tetapi landasan dasar penerapannya berbeda, seperti yang dijelaskan berikut ini.

a. Nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian sumpah menentukan

Alat bukti sumpah menentukan atau pemutus diatur dalam Pasal 1930 BW, berkaitan mengakhiri perkara, dan putusan sepenuhnya didasarkan dari isi sumpah, yang diucapkan. Sesuai dengan

²²*Ibid*, h. 551.

²³*Ibid*, h. 552.

sebutannya saja sumpah menentukan atau pemutus, sifat nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya mutlak, dalam arti:

- 1). Kesempurnaan, kekuatan mengikatnya dan kekuatan memaksanya adalah mutlak;
- 2). Sedemikian rupa mutlak kekuatan pembuktiannya, sehingga Pasal 177 HIR sendiri menegaskan, tidak dapat diminta bukti lain untuk menguatkan kebenaran yang disumpah pihak yang mengucapkannya;
- 3). Penggugurannya hanya mungkin dilakukan berdasar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas kejahatan sumpah palsu.²⁴

Batas minimalnya bersandar pada nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada diri alat bukti tersebut. Oleh karena kekuatan pembuktiannya secara mutlak, sempurna, mengikat dan memaksa, maka secara mutlak dapat berdiri sendiri, tanpa bantuan alat bukti lain, bahkan Pasal 177 HIR sendiri melarang permintaan menambah alat bukti lain untuk menguatkan kebenaran isi sumpah yang diucapkan.

- b. Nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian alat bukti sumpah tambahan

Mengenai alat bukti sumpah tambahan, diatur dalam Pasal 177 HIR dan Pasal 1940 BW. Batas minimal pembuktiannya berdasar Pasal 1941 BW, penerapan sumpah tambahan sebagai alat bukti, digantungkan pada syarat:

- 1). Jika tuntutan atau tangkisan tidak terbukti dengan sempurna;
 - 2) Jika tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak sama sekali tak terbukti.
- Maksudnya, pihak penggugat ada mengajukan bukti untuk membuktikan dalil gugatan, tetapi tidak sempurna atau tidak cukup memenuhi batas minimal pembuktian. Begitu juga tergugat ada

²⁴*Ibid*, h. 553.

pula mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya, tetapi tidak mencukupi batas minimal pembuktian. Berarti baik alat bukti yang diajukan penggugat maupun tergugat, sama-sama bernilai sebagai alat bukti permulaan. Barulah di atas landasan alat bukti permulaan itu hakim dibolehkan memerintahkan mengucapkan sumpah tambahan kepada salah satu pihak. Dari penjelasan ini, maka alat bukti sumpah tambahan, tidak dapat berdiri sendiri, sesuai dengan sifat dan figurnya, alat bukti sumpah tambahan hanya dapat ditegakkan di atas alat bukti permulaan, dengan demikian dia berfungsi untuk menambah kesempurnaan alat bukti permulaan yang ada.²⁵

Jadi dapat dikatakan, alat bukti sumpah tambahan bersifat asesor terhadap alat bukti permulaan. Tanpa alat bukti permulaan, tidak dapat dilahirkan dan diwujudkan sumpah tambahan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktiannya sumpah tambahan ini sama dengan sumpah menentukan, bersifat mutlak dan memaksa, di dalamnya melekat rangkaian kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan memaksa, tidak boleh diminta bukti lain

²⁵ *Ibid.*

untuk memperkuat kebenaran yang terkandung dalain isi sumpah yang diucapkan, hakim secara mutlak terikat menerima kebenarannya, sehingga putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari bukti tersebut.

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 0735/PDT.G/2008/PA/PBR

A. Pelaksanaan Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Perkara Cerai Gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama yakni Putusan Verstek Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR tertanggal 03 Desember 2008 jo Putusan Verzet Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR tertanggal 22 April 2009 dalam perkara cerai gugat dapat diketahui bagaimana penerapan sistem pembuktian dalam perkara tersebut.

Sebelum menganalisa sistem pembuktian dalam perkara cerai gugat ini, terlebih dahulu perlu diketahui alat-alat bukti apa saja yang diajukan para pihak dalam persidangan. Pihak Penggugat/Termohon dalam perkara ini mengajukan alat bukti formal berupa 2 alat bukti surat dan 4 orang alat bukti saksi. Adapun alat bukti surat yang diajukan Penggugat/Termohon sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Lismarinda Nomor 14.71.09.1003.014416.06 tanggal 11 Juli 2006 yang telah bermaterai cukup dengan nasegel pos dan dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan Camat Marpoyan Damai untuk selanjutnya bukti P.1.;
2. 1 (satu) buah asli Kutipan Akta Nikah beserta satu lembar foto copynya dengan Nomor 246/18/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 yang telah bermaterai cukup dan nasagel pos, telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, untuk selanjutnya bukti P.2 .

Sedangkan 4 orang alat bukti saksi yang diajukan Penggugat/Termohon adalah:

1. Saksi Hamdarisma binti Muhammad, umur 37 tahun
2. Saksi Dian Rahayu binti Suprapriyanto, umur 28 tahun
3. Saksi Dani Trisno bin Takaral, umur 54 dan
4. Saksi Noprیمان bin Norman Dt Paduko, umur 51

Selanjutnya, pihak Tergugat/Pemohon mengajukan alat bukti formal berupa 12 alat bukti surat dan 2 orang alat bukti saksi. Adapun alat bukti surat yang diajukan Tergugat/Pemohon sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar relas panggilan an. Rizky Syarifuddin Nomor 0735/Pdt.G/2008/PA.Pbr tanggal 21 Nopember 2008 oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. 1 (satu) lembar relas panggilan an. Rizky Syrifuddin Nomor 0735/PdtG/2008/PA.Pbr tanggal 27 Nopember 2008 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 2;
3. 1 (satu) lembar relas pemberitahuan isi Putusan an. Rizky Syarifuddin Nomor: 0735/Pdt.G/2008/PA.Pbr tanggal 09 Desember 2008 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3;
4. 1 (satu) lembar pas photo anak hasil perkawinan Lismarinda dengan Nasrul (suami pertama) yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 4;
5. 1 (satu) lembar foto copy KTP Lismarinda No. V14.71.09.1003.014416.06 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 246/18/VIII/2006 an. Rizky Syarifuddin dan Lismarinda yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 6;

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran an. Syahrul R. Syarifuddin yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 7;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran dan rumah bersalin Ibnu Husada tanggal 29 Oktober 2006 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 8;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tanggal 13 Mei 2008 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 9;
10. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi biaya persalinan tertanggal 29 Oktober 2006 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 10;
11. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah an. Nasrul dan Lismarinda No. 1091/61/III/1998 tanggal 10 Maret 1998 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 11;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nasrul tertanggal 10 September 2000 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 12 .

Sedangkan 2 orang alat bukti saksi yang diajukan Tergugat/Pemohon adalah:

1. Saksi Osnijal binti Jamatus, umur 55 tahun dan
2. Saksi Ir. Syarifuddin Adek bin H. Zainal Arifin Dt. Mangku, umur 55

Memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara cerai gugat di atas, maka dapat diketahui alat bukti yang diajukan tersebut adalah alat bukti formal berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi.

Memperhatikan dalil-dalil dan petitum yang diajukan pihak Tergugat/Pemohon dalam verzet atau perlawanannya terhadap putusan verstek perkara cerai gugat tersebut sebenarnya bermaksud untuk mematahkan alat bukti formal dari Penggugat/Termohon yakni alat bukti surat P.1. dan P.2. Secara tegas dalil-dalil pihak Tergugat/Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

“Pernikahan tanggal 11 Agustus 2006 terdapat kekeliruan administrasi dimana status Termohon adalah pernah kawin dan mempunyai dua orang anak yang bernama Naldi (laki-laki) sekarang duduk dibangku kelas 5 SD (11 Tahun) dan anak kedua juga laki-laki bernama Sandi (8 tahun) sekarang tidak diasuh oleh Termohon tetapi diasuh dan dipelihara dan dibesarkan oleh keluarga Termohon (terlampir T.4) Pejabat Pencatatan Nikah bukan orang yang berwenang sesuai dengan domisili Termohon di Jl. Irkab No. 32. Kel. Tangkerang Timur Pekanbaru dan telah pernah dilaporkan oleh orang tua Pemohon kepada instansi terkait (Kandepag) Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus 2006. Pejabat nikah KUA Kecamatan Lima Puluh yang melaksanakan pernikahan dengan kutipan akta nikah No. 26/18/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2008 (terlampir T. 5) tertera Pemohon berstatus perawan dan di dalam KTP berstatus tidak kawin (terlampir T.6). Adanya tindakan kejahatan memalsukan asal usul dan keterangan palsu termasuk pidana (Pasal 266 dan 277 KUHP) maka Pemohon keberatan dan menolak untuk diadili atau memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim kiranya perkara ditangguhkan sampai perkara pidana diselesaikan dahulu”.

Selanjutnya, dalam tambahan verzet Pemohon mendalilkan hal-hal yang pada intinya berkaitan dengan dalil-dalil pada permohonan verzetnya, yang isinya sebagai berikut:

“Pemohon tidak keberatan bila Termohon minta cerai tetapi tidak melalui putusan Pengadilan Agama karena akta nikah antara Pemohon dan Termohon terdapat kekeliruan atau tidak benar yang berarti akta nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan konsekuensinya perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama;

Alasan lain Pemohon sampaikan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dimana Termohon pernah menikah dan mempunyai akta nikah (No. 1091/61/III/98 tanggal 9 Februari 1998 (P 12 a) antara Pemohon dengan Nasrul (masih

mempunyai kekuatan hukum dan belum ada perceraian melalui Pengadilan Agama). Pemohon baru mendapatkan data bahwa Termohon hanya mempunyai surat pernyataan cerai dan talak dari suami pertama pada tanggal 10 September 2000 di Batam dan surat ini Pemohon sangsikan kebenarannya. Menurut hemat Pemohon secara hukum Akta Nikah Termohon dengan Nasrul masih berlaku, mohon Bapak Majelis Hakim untuk meneliti memeriksanya (P 12 a) kesimpulan Termohon mempunyai Akta Nikah dua buah (ganda) dimana Akta Nikah Termohon dengan Nasrul belum ada perceraian Putusan Pengadilan Agama dan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum dan masalah ini baru saya ketahui setelah terjadinya perkara dan saya tertipu, Akta Nikah yang kedua antara Pemohon dan Termohon terdapat kekeliruan (cacat hukum).

Pemohon memohon kepada Bapak ketua Majelis Hakim agar kedua surat KTP dan akta nikah yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini dikeluarkan atau dikesampingkan karena jelas kedua surat tersebut tidak benar dimana pada KTP Termohon tertulis tidak kawin dan pada akta nikah tertulis perawan. Pada kenyataannya Termohon telah berstatus isteri orang dan mempunyai anak dua”.

Sejalan dengan dalil Pemohon dalam permohonan verzetnya tersebut, maka

Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan kutipan Akta Nikah No. 26/18/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 tidak sah;
2. Menyatakan gugatan Termohon tidak dapat diadili Pengadilan Agama.

Membuktikan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar pas photo anak hasil perkawinan Lismarinda dengan Nasrul (suami pertama) yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 4;
2. 1 (satu) lembar foto copy KTP Lismarinda No. 14.71.09.1003.014416.06 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 5;

3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah an. Nasrul dan Lismarinda No. 1091/61/III/1998 tanggal 9 Februari 1998 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 11;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Nasrul tertanggal 10 September 2000 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 12 .

Akan tetapi, dari bukti saksi yang diajukan Pemohon, sama sekali tidak ada memberikan keterangan untuk menguatkan dalil Pemohon berkaitan dengan fenomena di atas. Terhadap hal tersebut dari fakta persidangan tidak semua dibantah oleh Termohon, dan juga tidak ada mengajukan bukti untuk mematahkan bukti dari lawan.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat tersebut dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa alat bukti T. 3 sampai dengan bukti T. 12 dipandang tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon. Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat tersebut yang tetap memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan menguatkan putusan verstek yang dijatuhkan pada tanggal 3 Desember 2008 dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang tidak benar;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0735/PDT.G/2008/PA.PBR tanggal 03 Desember 2008 Miladiyah, bersamaan dengan 05 Dzulhijjah 1429 Hijriyah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara perlawanan yang hingga kini dihitung sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .

Adapun amar putusan verstek yang dimaksud menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat Rizky Syarifuddin bin Ir. Syarifuddin Adek terhadap Tergugat Limarinda binti Masri M dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah anak yang bernama Syahrul Rizky;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Meskipun perceraian dengan suami pertama tidak pernah diputuskan melalui Pengadilan Agama sebagaimana didalilkan oleh Pemohon berikut bukti-bukti surat yang diajukannya, namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa alat bukti T. 3 sampai dengan bukti T. 12 dipandang tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon.

Seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat tersebut dalam memutuskan perkara tidak hanya memutuskan atas dasar kebenaran alat bukti formal. Karena pembuktian secara formal menurut ahli mempunyai banyak kelemahan, karena para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan.¹ Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3136K/Pdt.1983 adalah yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum, dikatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari

¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...Op.Cit.*, hal. 498.

dan menemukan kebenaran materil, sebaliknya apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.²

Menurut Roihan A Rasyid, “sistem pembuktian yang mendasarkan pada kebenaran formal itu sudah lama ditinggalkan karena keperluan hukum dan praktik penyelenggaraan peradilan dan aliran kebenaran formal juga sudah beralih kepada kebenaran materil, artinya walaupun alat bukti secara formal telah mencukupi, hakim tidak boleh memutus kalau tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara materil.³

Lebih dari itu dalam pandangan ahli hukum perdata lainnya, seperti M. Yahya Harahap mantan hakim agung yang bukunya banyak menjadi pegangan bagi advokat dan hakim berpendapat sejalan dengan apa yang dikemukakan Roihan A Rasyid di atas, sebagaimana telah disinggung pada uraian terdahulu.

Tetapi bila diperhatikan dalam perkara cerai gugat tersebut khususnya terkait dengan fenomena di atas, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini hanya menggunakan sistem pembuktian yang mendasarkan pada kebenaran formal.

Sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, seharusnya alat bukti tersebut dilihat apakah memenuhi syarat formil dan materil, alat bukti pihak mana yang

²*Ibid.*

³*Ibid.*

mencapai batas minimal pembuktian, dalil gugat apa saja yang terbukti, dan sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Bila dilihat dari segi syarat formil dan materil kedua alat bukti di atas, pertama terhadap 1 (satu) lembar photo copy kutipan akta nikah an. Nasrul dan Lismarinda No. 1091/61/III/98 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 11. Akta nikah tersebut merupakan akta bukti surat otentik dan menurut Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg nilai kekuatan akta otentik adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menurut M. Yahya Harahap terhadap kekuatan sempurna dan mengikat tersebut berarti alat bukti akta otentik yang diajukan memenuhi syarat materil dan formil dan bukti lawan yang dikemukakan tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).⁴ Subekti mengatakan kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta, juga sempurna dan mengikat hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.⁵

⁴*Ibid*, hal. 545.

⁵Subekti, *Hukum...Op.Cit.*, hal. 27.

Adapun batas minimal pembuktian akta otentik menurut M. Yahya Harahap adalah:

1. Batas minimalnya cukup pada dirinya sendiri
Oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti lain. Dengan demikian, secara berdiri sendiri alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian.
2. Kekuatan pembuktian dan batas minimalnya dapat berubah menjadi bukti permulaan tulisan.
Namun demikian, nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta batas minimalnya bisa berubah disebabkan :
 - a. Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);
 - b. Bukti lawan yang diajukan pihak lawan demikian rupa setara dan sempurna sehingga mampu menggoyahkan eksistensi akta otentik yang bersangkutan. Dalam kasus yang demikian, nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian berubah menjadi tidak sempurna lagi, tetapi merosot menjadi bukti permulaan tulisan. Oleh karena itu, batas minimalnya pun merosot sehingga tidak dapat lagi berdiri sendiri, tetapi harus dibantu dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti lain .

Demikianlah sistem dan prinsip yang harus diterapkan dalam menentukan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian yang melekat pada alat bukti akta otentik. Lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap bagi hakim yang tidak profesional, kemungkinan besar kacau dan keliru menerapkannya.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg di atas serta didukung dengan pendapat ahli tersebut selanjutnya dihubungkan dengan alat bukti surat pertama tersebut, yakni kutipan akta nikah an. Nasrul dan Lismarinda No. 1091/61/III/98 yang merupakan akta otentik seharusnya dapat diterima menjadi alat bukti. Telah diketahui bahwa nilai kekuatan pembuktian

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...Op.Cit.*, hal. 546.

pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat. Apalagi Termohon tidak dapat mematahkan alat bukti tersebut dengan bukti lawan yang rupa setara dan sempurna. Oleh karena itu, sebagai akta otentik maka akta nikah tersebut pada dasarnya berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti lain. Secara berdiri sendiri alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian. Berkenaan dengan itu, tidak perlu mendapat dukungan dengan alat bukti lain. Meskipun ternyata tetap diajukan Pemohon yakni 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Nasrul tertanggal 10 September 2000 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 12.

Sehubungan dengan itu, pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara cerai gugat tersebut, yang menyatakan alat bukti Pemohon mulai dari T. 3 sampai dengan bukti T. 12 dipandang tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon adalah pertimbangan yang tidak cukup pertimbangan bahkan salah menerapkan hukum. Padahal alat bukti T. 11 adalah akta nikah antara Termohon dengan Nasrul (suami pertama) dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat serta dapat berdiri sendiri dan dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian.

Berkenaan dengan itu, alat bukti T. 11 menurut hukum eksistensinya demikian rupa setara dan sempurna sehingga cukup untuk menggoyahkan eksistensi akta otentik P. 2. Bahkan untuk mendukung alat bukti T. 11 Pemohon

mengajukan alat bukti lain yakni 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Nasrul tertanggal 10 September 2000 yang bermaterai secukupnya dan nasegel pos serta dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 12. Dalam keadaan ini, seharusnya nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian alat bukti P. 2 telah berubah menjadi tidak sempurna lagi, tetapi merosot menjadi bukti permulaan tulisan. Oleh karena itu, batas minimalnya telah merosot maka ia tidak dapat lagi berdiri sendiri, tetapi harus dibantu dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti lain.

Tetapi, memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana termuat dalam putusan perkara cerai gugat tersebut Penggugat/Termohon tidak ada mengajukan alat bukti lain yang sifatnya untuk membantu dan mendukung kekuatan alat bukti P. 2 atau dalil yang menguatkan.

Oleh karena itu, bila dilihat dari alat bukti yang diajukan Tergugat/Pemohon secara formal dan materiil cukup untuk mengoyahkan alat bukti P. 2 atau mematahkan alat bukti formal dari pihak lawan. Sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon seharusnya menjadi cacat sebagaimana dalil yang dipertahankan oleh Tergugat/Pemohon dalam perlawannya. Pernikahan antara Penggugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon tersebut adalah cacat hukum terutama bila dilihat dari ketentuan sebagai berikut: Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni :

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”.

Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam :

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 40 dan Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan perkawinan sebagai perkawinan yang cacat hukum. Tetapi terhadap cacatnya perkawinan yang kedua ini, seharusnya diajukan permohonan pembatalan perkawinan, sebagaimana ditentukan menurut Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 .

Akan tetapi, pembatalan perkawinan dengan antara Penggugat/Termohon dengan Tergugat/Pemohon tidak ada diajukan terutama oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan sebagaimana ditentukan pada Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Artinya, sepanjang tidak ada pembatalan, maka perkawinan antara Penggugat/Termohon dengan Tergugat/Pemohon harus dinyatakan tetap sah, meskipun menurut peraturan perundang-undangan telah cacat dari segi materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 40 dan Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Berkenaan dengan itu meskipun alat bukti T. 11 yang diajukan Tergugat/Pemohon secara formal dan materil cukup untuk mengoyahkan alat bukti P. 2 atau mematahkan alat bukti formal dari pihak lawan atau dengan kata lain mematahkan hubungan hukum antara Penggugat/Termohon dengan Tergugat/Pemohon. Akan tetapi, kelemahan dari dalil Tergugat/Pemohon bukan dari alat bukti yang diajukannya, melainkan dalil itu tidak tepat dipertahankan dalam perkara aqou. Mengapa? sebab untuk menyatakan perkawinannya tidak sah atau cacat hukum harus diajukan pembatalan perkawinan dan terpisah dari perkara yang sedang disengketakan. Dengan demikian sepanjang tidak ada pembatalan, maka perkawinan antara Penggugat/Termohon dengan Tergugat/Pemohon dapat dinyatakan tetap sah, meskipun bila dilihat dari segi materinya terdapat unsur yang membuatnya cacat. Dengan demikian meskipun sistem pembuktian yang diterapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR tidak menerapkan sistem

pembuktian secara materiil sebagaimana telah diupayakan oleh Tergugat/Pemohon dengan mengemukakan dalil dan alat bukti guna mematahkan alat bukti formal lawan. Sama artinya dalil dan alat bukti yang diajukan Tergugat/Pemohon dipandang tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon. Karena yang tepat adalah pembatalan perkawinan sebagaimana telah dikemukakan.

Akhir perkara cerai gugat ini membuat status perkawinan antara Penggugat/Termohon dengan Tergugat/Pemohon telah berakhir, sebagaimana digariskan oleh Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi anehnya status suami pertama (Nasrul) menurut hukum positif sampai terjadinya perceraian dengan Tergugat/Pemohon harus dinyatakan tetap sah menjadi suami dari Penggugat/Termohon karena tidak pernah diputuskan cerai di depan sidang Pengadilan Agama. Keadaan ini sungguh sangat rancu dan merusak tatanan hukum, bagaimana tidak seseorang yang telah menikah untuk kedua kali, sedangkan pernikahannya yang kedua telah dinyatakan berakhir karena perceraian, akan tetapi perkawinan dengan suami pertama justru belum berakhir.

B. Pertimbangan Hukum yang dibuat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Cerai Gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR

Menurut M. Yahya Harahap, pertimbangan hukum dalam suatu putusan merupakan jiwa dan intisari putusan, dan dalam pertimbangan hukum harus

dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian, diantaranya :

1. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil;
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
3. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti; dan
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak .⁷

Berkenaan dengan itu, maka pertimbangan hukum dalam perkara cerai gugat ini seharusnya memuat argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.⁸ Tetapi bila diperhatikan pertimbangan hukum putusan verstek Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat jo putusan verzet Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat ini, akan tampak kejanggalannya jika dihubungkan dengan pendapat ahli, beberapa diantaranya:

1. Tidak ada pertimbangan hukum terkait bantahan Tergugat/Pemohon bahwa Penggugat/Termohon masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan suami pertama yang memiliki akta nikah dan belum ada perceraian melalui Pengadilan Agama (lihat dalam tambahan verzet poin 5 dari Tergugat/Pemohon), yang isinya dikutip sebagai berikut:

“Alasan lain pemohon sampaikan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dimana Termohon pernah menikah dan mempunyai Akta Nikah (No. 1091/61/III/98 tanggal 8 Februari 1998) (P 12 a) antara Termohon dengan Nasrul (masih mempunyai kekuatan hukum dan belum ada perceraian melalui Pengadilan Agama). Pemohon baru mendapatkan data bahwa Termohon hanya mempunyai surat cerai dan talak dari suami pertama

⁷*Ibid*, h. 809.

⁸*Ibid*.

pada tanggal 1 September 2000 di Batam dan surat ini Pemohon sangsikan kebenarannya. Menurut hemat Pemohon secara hukum Akta Nikah Termohon dengan Nasrul masih berlaku, mohon Bapak Majelis Hakim untuk meneliti memeriksanya (P 12 a) kesimpulan Termohon mempunyai Akta Nikah dua buah (ganda) dimana Akta Nikah Termohon dengan Nasrul belum ada perceraian Putusan Pengadilan Agama dan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum dan masalah ini baru saya ketahui setelah terjadinya perkara dan saya tertipu, Akta Nikah yang kedua antara Pemohon dan Termohon terdapat kekeliruan (cacat hukum)”.

Terhadap hal ini Tergugat/Pemohon telah mengajukan 2 buah alat bukti tertulis yang dapat diperlihatkan aslinya, yakni : alat bukti T. 6 dan T. 11. Sebaliknya dari fakta persidangan Pengugat/Termohon tidak dapat melumpuhkan alat bukti tersebut.

2. Tidak ada pertimbangan hukum terkait sanggahan dari Tergugat/Pemohon bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat/Termohon telah memberikan keterangan palsu (lihat dalam tambahan verzet poin 5 dari Tergugat/Pemohon), yang isinya dikutip sebagai berikut:

“Putusan Verstek No.0735/Pdt.G/2008 PA.Pbr kami nyatakan ditolak dan perlu dibantah karena para saksi telah memberikan kesaksian bohong dan serta merta memutar balikan fakta yang terjadi, dengan alasan para saksi tidak satupun turut serta mengalami kejadian secara langsung apa-apa yang telah terjadi apalagi telah berbuat cerita bohong atau memberikan kesaksian palsu:

1. Saksi Hamdarisma binti Muhammad adik dari Ibu Termohon, kesaksian dan keterangan yang diberikan tidak pernah melihat kapan terjadinya, dimana terjadinya orang tua Pemohon melarang untuk melihat anaknya (Syahrul Rizki Syarifuddin). Saksi mengatakan mendamaikan, tentang apa yang didamaikannya. Perlu Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia ketahui bahwa saya sebagai Pemohon bukanlah disebabkan masalah anak karena anak yang membiayai yang mengasuh adalah orang tua Pemohon dan ini adalah atas mufakat bersama kedua belah pihak, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon dan juga Termohon sendiri. Jadi bukan masalah ekonomi karena Pemohon dan Termohon bersama-sama mencari nafkah dengan

berdagang. Tetapi gara-gara Pemohon bertengkar dengan Termohon adalah disebabkan Yamaha yang dipakai Pemohon milik orang tua Pemohon digadaikan seharga Rp 7.000.000,- dan uang sebanyak Rp 3.000.000,- diambil oleh Termohon dan Termohon tidak mau mengembalikan uang tersebut. Malahan Termohon menyuruh ambil saja anak dan uang Rp 3.000.000,- tidak usah dikembalikan. Kejadian ini disaksikan oleh Hamdarisma (sebagai saksi pertama). (P. 9) jadi jelas saksi Hamdarisma binti Muhammad terbukti memberikan keterangan palsu dan memutar balikan fakta yang sebenarnya dan kesaksian serta keterangan saksi harus ditolak atau dikesampingkan untuk dijadikan alat bukti dalam perkara No. 0735/Pdt.G/2008/PA.Pbr;

2. Dian Rahayu binti Suprarianto (adik ipar Termohon) juga memberikan kesaksian keterangan palsu dan memutar balikan fakta yang sebenarnya dan Pemohon menolak dan harus dikesampingkan untuk dijadikan alat bukti. Keterangan saksi tentang adanya Termohon menjemput anak kerumah orang tua Pemohon tidak berhasil karena diusir oleh orang tua Pemohon. Ini adalah bohong dan perlu dipertanyakan kepada saksi kapan waktunya dimana dan apakah saksi melihat langsung kejadiannya. Begitu juga terhadap keterangan saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dan suka memukul”.

3. Tidak ada pertimbangan hukum terkait sanggahan dari Tergugat/Pemohon bahwa KTP dan akta nikah yang dijadikan alat bukti oleh Penggugat/Termohon menurut sanggahan dari Tergugat/Pemohon berisi keterangan palsu dan harus dikesampingkan menjadi alat bukti karena masih terikat perkawinan dengan suami pertama (lihat dalam tambahan verzet poin 6 dari Tergugat/Pemohon), yang isinya dikutip sebagai berikut:

“Pemohon dan memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim agar kedua surat yaitu KTP dan Akta nikah yang dijadikan alat bukti dalam perkara ini dikeluarkan atau dikesampingkan karena jelas kedua surat tersebut tidak benar dimana KTP Termohon tertulis tidak kawin dan pada Akta Nikah tertulis perawan. Pada kenyataannya Termohon telah berstatus janda dan mempunyai anak”.

Terhadap hal ini Tergugat/Pemohon telah mengajukan 2 buah alat bukti tertulis yang dapat diperlihatkan aslinya, yakni : alat bukti T. 11 dan T. 12. Sebaliknya dari fakta persidangan Pengugat/Termohon tidak dapat melumpuhkan alat bukti tersebut.

4. Tidak ada pertimbangan hukum terkait bantahan dari Tergugat/Pemohon bahwa mengenai hak hadhanah anak, meskipun menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak di bawah usia 12 tahun adalah hak ibunya mengingat Penggugat/Termohon seorang tuna rungu dan tuna wicara bantahan-bantahan Tergugat/Pemohon mengenai hak hadhanah sebaiknya dapat dipertimbangkan. (lihat dalam permohonan verzet poin 4 dan 5 dari Tergugat/Pemohon), yang isinya dikutip sebagai berikut:

“Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhonah anak yang bernama Syahrul Rizki, juga Pemohon bantah karena Putusan Pengadilan tentang hadhonah belum dapat diputuskan karena Pemohon masih mempunyai hak panggil untuk menghadap Pengadilan dimana jatuhnya talak 1 tidak Pemohon terima. Sekiranya putusan talak 1 selesai barulah ditentukan dalam persidangan. Siapa pemegang hak hadhonah. Pemohon menolak dan berkeberatan Termohon sebagai pemegang hak hadhonah tadi dimana Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat dapat mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah tuna rungu dan di bawah pengampuan hukum jadi tidak dapat diberikan hak pemegang hadhonah. Sejak umur 1 jam anak (Syahrul Rizky) lahir ke dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina pada tanggal 28 Oktober 2006 jam 09.00 WIB pagi dengan Bidan Farida (terlampir P.7) telah dipelihara diasuh dan dibesarkan dan dibiayai seluruhnya sampai sekarang umur 2 tahun oleh orang tua Pemohon dan tidak pernah Termohon memelihara mengasuh membesarkan dan membiayai walaupun setitik air susu Termohon (tidak pernah disusukan) (terlampir P. 8). Artinya Termohon termasuk ibu yang tidak mempunyai tanggung jawab dan hati nurani terhadap anak yang dilahirkan tidak mempunyai rasa kasih sayang dan kemampuan untuk mengasuh anak memelihara membesarkan sedangkan anak yang dan lagi ditelantarkan dan diasuh dan dibesarkan oleh orang lain bukan oleh

Termohon sebagai ibu kandungnya. Dan disatu sisi orag tua Termohon juga tidak bertanggung jawab Termohon saat hamil besar dan akan melahirkan orang tua Termohon lari pulang kampung melepas tanggung jawab anak ditinggalkan dan melahirkan sendirian tanpa mempunyai persiapan melahirkan dan sang anak hanya diibungkus dengan kain sarung yang tak layak dipakai oleh bidan Rumah Sakit Ibnu Sina sedangkan orang tua laki-laki Termohon datang jam 4 sore ketempat praktek Bidan Farida dan Pemohon mencari kerumah isteri mudanya. Orang tua Pemohon bukan orang yang menguasai begitu saja anak yang bernama Syahrul Rizky tetapi telah mendapat persetujuan baik Termohon sebagai ibunya dan kedua orang tua Termohon alangkah naifnya bahwa anak Syahrul Rizky diputuskan bahwa Termohon diberikan sebagai pemegang hak hadhonah. Mohon Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat membatalkan putusan Termohon sebagai hak hadhonah. Pemohon akui bahwa hubungan suami istri sejak dari awal tidak harmonis bukan seperti alasan Termohon pada surat gugatan tanggal 06 November 2008 kepada Ketua Pengadilan dst...dst...”

“Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Temohon ini juga Pemohon tolak karena sejak kecil anak bernama Syahrul Rizky telah diasuh dan dibesarkan dibiayai sampai sekarang umur 2 tahun oleh orang tua Pemohon berdasarkan MUFAKAT BERSAMA kedua belah pihak keluarga dan anak bernama Syahrul Rizky bukan berada dan dipelihara oleh Pemohon tetapi oleh orang tua Pemohon sejak umur 1 jam sampai sekarang berumur 2 tahun. Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya putusan menyerahkan anak kepada Termohon mustahil atau tidak masuk akal sehat demi terjaminnya kehidupan masa depan anak. Tentang masalah anak baru dapat diselesaikan jika telah ada talak dan Pemohon sebagai bapaknya juga mempunyai hak terhadap anak. Pemohon memberikan alasan bantahan dan penolakan bahwa mustahil anak diserahkan kepada Termohon yang mempunyai cacat (tuna rungu) dimana sejak awal Termohon tidak mempunyai niat untuk memelihara untuk mengasuh untuk membesarkan untuk membiayai dan tidak mempunyai kemampuan untuk merawat anak dan sampai sekarang masih ada tunggakan biaya persalinan kepada Bidan Farida yang belum diselesaikan (terlampir P. 10)”.

Terhadap hal ini Tergugat/Pemohon telah mengajukan 4 buah alat bukti tertulis yang dapat diperlihatkan aslinya, yakni : alat bukti T.7, alat bukti T.8, dan T.9, dan T.10. Sebaliknya dari fakta persidangan Pengugat/Termohon tidak dapat melumpuhkan alat bukti tersebut.

Berdasarkan keadaan di atas, maka dapat dikatakan pertimbangan hukum putusan verstek Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat jo putusan verzet, adalah tidak cukup pertimbangan. Dimana putusan tersebut tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan para pihak. Menurut M. Yahya Harahap putusan yang tidak cukup pertimbangan bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBg dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama. Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972 juga menegaskan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka putusan tersebut harus dibatalkan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui putusan verstek Pengadilan Agama Pekanbaru jo putusan verzet dalam perkara cerai gugat tersebut, adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan. Karena tidak ada analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian, diantaranya apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil gugat apa saja dan

⁹*Ibid*, h. 890.

dalil bantahan apa saja yang terbukti, dan sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Akan lebih baik jika pertimbangan tersebut disertai analisis terhadap setiap dalil dan alat bukti yang diajukan para pihak terutama apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, dan sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. Dapat penulis contohkan misalnya dalam pertimbangan hukum sebaiknya tetap mempertimbangkan alat bukti T. 11 yang diajukan Tergugat/Pemohon secara formil dan materiil cukup untuk mengoyahkan alat bukti P. 2 akan tetapi disertai penjelasan dalil dan alat bukti itu tidak tepat dipertahankan dalam perkara aqou. Mengapa? sebab untuk menyatakan perkawinannya tidak sah atau cacat hukum harus diajukan pembatalan perkawinan dan terpisah dari perkara yang sedang disengketakan. Dengan demikian pertimbangan hukum yang dibuat akan cukup lengkap membuat analisis terhadap setiap dalil dan alat bukti yang diajukan para pihak.

C. Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Perkara Cerai Gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR

Penyelesaian masalah hukum dikalangan orang-orang Islam dalam perkara perdata tertentu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sejatinya harus

merupakan puncak kearifan sehingga para pencari keadilan dapat merasakan keadilan yang optimal.

Membuktikan benar atau tidaknya gugatan ataupun jawaban dari pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, maka proses pembuktian merupakan proses yang sangat menentukan. Dalam pembuktian ini diperlukan alat bukti dan alat bukti adalah upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya.¹⁰ Di dalam kitab-kitab fiqih kebanyakan *fuqaha* menyebut alat bukti dengan *Al Bayyinah*, *Al Hujjah*, *Ad Dalil*, *Al Burhan*, tetapi yang tiga terakhir ini tidak lazim diperkara.¹¹

Pengertian *bayyinah* merupakan suatu bukti-bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar meyakinkan hakim.¹² Adapun yang dimaksudkan dengan yakin adalah sesuatu yang ada berdasarkan kepada penyelidikan yang mendalam dan sesuatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya keyakinan yang lain lebih kuat dari pada keyakinan yang ada sebelumnya.

Kalau seorang isteri ingin menggugat cerai suaminya, maka ia terlebih dahulu harus membuktikan dirinya adalah betul-betul isteri dari si suami yang digugat dan si suami benar-benar telah melanggar kewajibannya, kesemuanya ini harus dibuktikan akan kebenaran yang diajukan ke pengadilan,

¹⁰Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Syari'ah*, (Makassar : tp. 2001), h. 100.

¹¹*Ibid.*

¹²Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), Cet. ke-1, h. 133.

walaupun demikian hakim juga tidak langsung menerima keinginan si penggugat tersebut, akan tetapi ia harus meneliti dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan itu. Rasulullah, SAW pernah mengingatkan :¹³

فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ
يَتَّبِعَنَّ لَكَ الْقَضَاءُ

”Jika duduk di hadapanmu dua orang yang berperkara maka janganlah engkau memutuskan hingga engkau mendengarkan pihak lain sebagaimana pihak yang pertama, karena hal itu akan lebih baik sehingga jelas bagimu dalam memutuskan perkara”.

Hadits di atas, mengandung pesan bahwa dalam memutuskan suatu persengketaan, haruslah dilakukan secara cermat, teliti dan tidak harus percaya hanya pada pengaduan sepihak saja, melainkan harus memperhatikan bukti-bukti yang diajukan semua pihak sehingga ketika hakim memutuskan dapat benar-benar memutuskan secara adil.

Berdasarkan uraian singkat ini, maka dapat diketahui bahwa tujuan utama dari alat bukti ialah untuk lebih memperjelas dan meyakinkan hakim sehingga ia tidak keliru dalam menetapkan putusannya dan pihak yang benar tidak dirugikan sehingga dengan demikian keadilan di muka bumi ini dapat ditegakkan.

Alat bukti dalam hukum Islam terdiri dari beberapa macam yang disepakati oleh mazhab-mazhab, diantara alat bukti yang kebanyakan digunakan oleh para

¹³H.R. Ahmad dan Abu Daud dalam Machfuddin Aladip dkk, *Bidang Studi Al-Qur'an –Hadist*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1983), Cet. ke-3, h. 242.

fuqaha seperti diungkapkan oleh Abu Yusuf: “sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, *qasamah*, *bayyinah*, ilmu *qadhi* dan petunjuk-petunjuk”.¹⁴

Alat bukti sumpah yang dijadikan sebagai *bayyinât*, yaitu sumpah atas peristiwa yang telah terjadi yang dilakukan setelah seseorang diminta oleh hakim di pengadilan. Sumpah menurut bahasa hukum Islam disebut *al amin* atau *al hiff* tetapi kata *al yamin* lebih umum dipakai. Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Nya.¹⁵ Pada dasarnya, sumpah ini adalah dari pihak yang digugat atau dituntut.

Alat bukti sumpah ini bermacam-macam, sumpah ada yang memiliki bentuk tersendiri seperti sumpah *li'an* (dalam perkara zina) dan sumpah *qasamah* (di lapangan pidana), bagaimanapun juga, selain dari sumpah *li'an* dan sumpah pemutus, alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti dapat diandalkan untuk pengambilan putusan terakhir.

Selanjutnya alat bukti saksi, jika dilihat dari pengertian terminologi berarti orang yang mempertunjukkan, memperlihatkan, sebagai bukti.¹⁶ Sedangkan

¹⁴Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam...Op.Cit.*, h. 100-101.

¹⁵Gemala Dewi, *Hukum Acara...Loc.Cit.*

¹⁶Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cet.ke-2, h. 779.

menurut istilah syara' ialah orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri.¹⁷ Jadi saksi yang dimaksud dalam hal ini adalah manusia hidup. Sedangkan menurut Sayid Sabiq dalam kitab sunnah bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah memberitahukan seseorang tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.¹⁸ Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan sebenarnya.

Menurut hukum Islam saksi adalah *fardhu kifayah* (QS 2 : 283; QS 5 : 8). Dengan kata lain, jika terjadi suatu perkara dan seseorang menyaksikan perkara tersebut, maka *fardhu kifayah* baginya untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya, maka ia menjadi *fardhu 'ain*. Dengan pemahaman ini seorang saksi tentu tidak akan keberatan atau mangkir dari memberi kesaksian di pengadilan sebab ia merupakan perbuatan yang bernilai pahala. Selain itu, kesaksian harus didasarkan pada keyakinan pihak saksi, yakni berdasarkan pengindraanya secara langsung pada peristiwa tersebut. Diriwayatkan dari Rasulullah saw:

“Jika engkau mengetahuinya seperti (melihat) matahari maka bersaksilah. Namun, jika tidak maka tinggalkanlah”.¹⁹

¹⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...Op.Cit.*, h. 152.

¹⁸Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah, Jilid 3*, (Jakarta : al Maktabah al Khadimat al Haditsah, 1989), Cet. ke-2, h. 318.

¹⁹HR al-Baihaqi dan al-Hakim dalam Machfuddin Aladip dkk, *Bidang Studi...Op.Cit.*, h. 145.

Bila dimaksudkan bahwa saksi adalah orang yang betul-betul sebagai saksi karena menyaksikan sendiri suatu perkara, maka dinilai bahwa kesaksian tersebut merupakan salah satu bukti dalam hukum pembuktian. Kebanyakan ahli hukum Islam (*fuqaha*) menyamakan kesaksian itu dengan *bayyinah*²⁰ Dasar hukum dari pada alat bukti saksi dapat dilihat dalam Q.S. al Baqarah (2) : 282, yakni :

وَلْيَسْتَأْذِنُوا بَيْنَ يَدَيْهِمَا ذَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَأُولَٰئِكَ يَقْبَلُونَ الشَّهَادَاتِ بِالْحَقِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ تَعْلَمُونَ

Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”²¹

Dalam dalam Q.S. an Nisah (4) : 135, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبَحْتُمْ سَوَافِهَ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَبْلَ هَٰذَا تُكْفَرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...”²²

Kesaksian hanya wajib ditunaikan jika saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menyimpannya baik dibadannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S. al Baqarah (2) :

²⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...Op.Cit.*, h. 152-153.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...Loc.Cit.*

²²*Ibid*, h. 131.

untuk membuktikan suatu kebenaran antara pihak-pihak yang berperkara, hingga adanya saksi sebagai alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, tidak begitu saja diterima sebelum saksi yang diajukan kemuka pengadilan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum pembuktian. Untuk memberitahukan kesaksian yang dapat diterima serta dapat dijadikan pembuktian kuat wajib memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Beragam Islam
2. Baliqh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Adil ²⁵

Syarat-syarat saksi yang dikemukakan di atas adalah merupakan syarat-syarat yang harus dipegang oleh Pengadilan Agama, namun ada beberapa tambahan syarat seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnahnya, dengan dua syarat tambahannya yaitu mampu berbicara tidak bisu, dan bukan sanak famili atau keluarga terdekat salah satunya.²⁶ Persyaratan yang harus dimiliki oleh saksi atau beberapa orang saksi seperti yang telah diuraikan di atas merupakan syarat mutlak yang mesti ada pada saksi, walaupun dalam beberapa hal sebagaimana yang dimaksud oleh Sayyid Sabiq harus tidak bisu dan khusus yang diatur oleh Pengadilan Agama dalam perkara perdata.²⁷

Namun, praktik di Pengadilan Agama, untuk penyelesaian cerai gugat ataupun cerai talak, justru saksi yang diminta memberikan keterangan adalah dari

²⁵Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...Op.Cit.*, h. 166.

²⁶Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah...Loc.Cit.*

²⁷*Ibid.*

keluarga terdekat. Hal ini mengingat dalam hubungan perkawinan yang sedang terjadi perpecahan jarang sekali diketahui oleh orang lain yang bukan dari keluarga terdekat, dan sangat beralasan hukum yang mengetahui persoalan rumah tangga yang bersifat pribadi itu adalah keluarga dekat. Keretakan dalam rumah tangga, sangat masuk akal ditutupi oleh suami isteri yang sedang berselisih tersebut untuk diketahui orang lain yang tidak ada relevansinya karena itu adalah aib bagi yang bersangkutan.

Begitu juga saksi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara cerai gugat sebagaimana terdapat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR tertanggal 03 Desember 2008 jo Putusan Verzet Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR juga merupakan keluarga dekat dari masing-masing pihak.

Syarat-syarat saksi yang diuraikan di atas adalah merupakan syarat yang dikenakan pada seorang saksi sebelum memberikan kesaksian, karena saksi dalam hal ini merupakan orang yang menyaksikan suatu peristiwa hukum yang sekaligus sebagai syarat hukum dalam membuktikan kebenaran yang terdapat pada salah satu pihak yang mengajukan perkaranya di muka sidang, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syarat-syarat tersebut merupakan ketentuan khusus yang dianjurkan oleh hukum pada seorang saksi.

Setiap orang pada prinsipnya dapat menjadi saksi. Namun demikian, untuk memelihara obyektifitas saksi dan kejujurannya, ada orang tertentu oleh undang-undang tidak dapat diperkenankan menjadi saksi sebagai dasar untuk memutus

perkara perdata tertentu, karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak, atau karena keadaan tertentu orang tidak boleh di dengar sebagai saksi adalah :

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang sah kecuali dalam perkara perceraian;
2. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian;
3. Anak yang tidak diketahui benar umurnya sudah 15 tahun;
4. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan yang terang

Eksistensi saksi dalam memberikan kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangkan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat/mengetahui sendiri tentang yang bersangkutan. Pada umumnya pihak ketiga lebih obyektif di dalam memberikan keterangan dari pada pihak yang berperkara, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan pula akan betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak dari peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya, sehingga kesaksian hanya merupakan satu-satunya alat bukti yang masih ada atau tersedia.

Tidak dibenarkan bagi saksi memberikan kesaksiannya berdasarkan pendengaran saja dari orang lain, atau merupakan kesimpulan yang ditarik sendiri dari peristiwa yang dilihat atau dialaminya, sebab hanya hakim yang berhak menarik kesimpulan dari peristiwa hukum yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara.

²⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Islam Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet.ke-4, h. 373.

Walaupun eksistensi saksi dalam suatu persidangan dipandang sangat penting, namun ia tidak bersifat mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak, artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi.²⁹ Berkenaan dengan itu dihubungkan dengan perkara cerai gugat dalam penelitian ini, meskipun Pengugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing adalah keluarga dekat para pihak, namun keterangan yang diberikan seharusnya tidak mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak.

Selanjutnya, alat bukti pengakuan atau ikrar yaitu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Ikrar atau pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan.

Syarat-syarat pelaku ikrar (pengakuan):

1. Baliqh : dewasa;
2. Aqil : berakal/waras, tidak gila;
3. Rasyid : punya kecakapan bertindak .³⁰

Sedangkan jenis-jenis pengakuan :

1. Lisan;
2. Isyarat, kecuali dalam perkara zina;
3. Tertulis .³¹

²⁹R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1992), Cet.ke-4, h. 181.

³⁰Gemala Dewi, *Hukum Acara...Op. Cit.*, h. 135.

³¹*Ibid.*

Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut Acara Pengadilan Islam, antara lain:

1. Al-Qur'an, surat 4 An Nisa ayat 135 yaitu:



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu....”³²

2. Hadits Riwayat Bukhary Muslim, dari Abi Hurairah:

Artinya : Sewaktu Rasulullah SAW di dalam masjid, telah datang seorang laki-laki muslim. Ia berseru kepada Rasulullah ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Rasulullah berpaling dari padanya orang itu berputar menghadap kearah Rasulullah dan berkata. Ya Rasulullah, saya telah berzina, Rasulullah berpaling dari padanya hingga orang itu ulangi yang demikian itu sampai empat kali. Tatkala orang itu telah saksikan (kesalahan) dirinya empat persaksian (maksudnya empat kali mengaku), Rasulullah panggil ia dan Rasulullah bertanya. Apakah anda tidak gila? Orang itu menjawab, tidak. Tanya Rasulullah lagi, apakah anda sudah kawin? Orang itu menjawab, sudah, maka Rasulullah saw bersabda bawalah orang ini pergi dan rajamlah ia”.³³

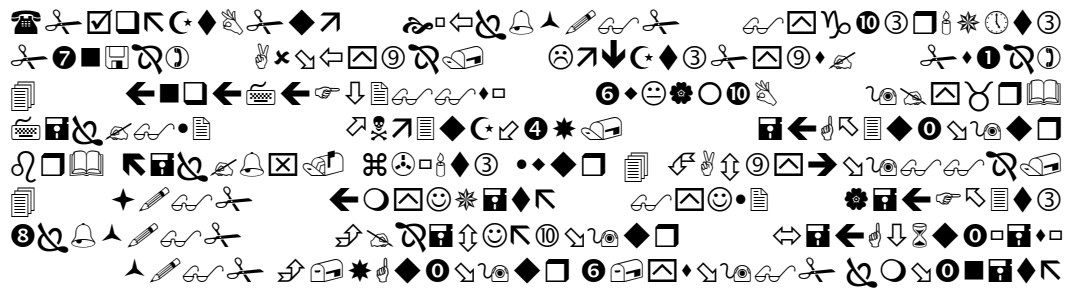
Hadits ini mengingatkan jika seseorang telah melakukan pengakuan di pengadilan, maka hakim tidak boleh serta merta menerima pengakuan itu hingga ia yakin bahwa pengakuan tersebut lahir dari kesadaran orang tersebut.

Selanjutnya, alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...Op.Cit.*, h. 135.

³³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara...Op..Cit.* h. 171.

pembuktian.³⁴ Al-Qur'an memerintahkan kepada orang yang beriman untuk menuliskan transaksi yang terjadi diantara manusia, sebagaimana terdapat dalam Al- Baqarah (3) : 282 berikut :



Terjemahnya : “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, janganlah penulis menolak untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah”.³⁵

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam menetapkan perlunya mendokumentasikan misalnya dalam bentuk tulisan berbagai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi diantara manusia karena itu sangat beralasan kalau tulisan atau surat-surat dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Alat bukti tertulis atau dokumen, penggunaan dokumen tertulis menjadi landasan yang tak terpisahkan dalam perkembangan *tsaqâfah* Islam, seperti pada ilmu fikih dan hadits. Dokumen setidaknya ada tiga jenis, yaitu dokumen yang bertandatangan, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara dan dokumen yang tidak bertandatangan. Pada dasarnya dokumen bertandatangan adalah sama statusnya sama

³⁴Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam...Loc.Cit.*

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...Op.Cit.*, h. 59.

dengan pengakuan dengan lisan. Oleh karena itu, dokumen tersebut membutuhkan penetapan. Jika seseorang mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam sebuah dokumen adalah miliknya maka dokumen tersebut sah dijadikan bukti. Namun, jika ia mengingkarinya maka dokumen tersebut tertolak.

Adapun untuk dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah seperti surat nikah, akta kelahiran, akta yang dibuat dihadapan pejabat negara seperti notaris, maka ia tidak membutuhkan adanya penetapan terhadap keabsahannya. Oleh karena itu, dokumen langsung dapat dijadikan sebagai bukti.

Oleh karena itu, dihubungkan dengan perkara Verstek Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR jo Verzet Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara cerai gugat tersebut, yang menyatakan alat bukti Pemohon mulai dari T. 3 sampai dengan bukti T. 12 dipandang tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon adalah pertimbangan yang tidak cukup pertimbangan bahkan salah menerapkan hukum. Padahal alat bukti T. 11 adalah akta nikah antara Termohon dengan Nasrul (suami pertama) dan merupakan akta otentik atau dengan kata lain dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. Oleh karena itu, dokumen itu selayaknya langsung dapat dijadikan sebagai bukti.

Oleh karena itu, bila dilihat dari alat bukti yang diajukan Tergugat/Pemohon secara formal dan materiil cukup untuk mengoyahkan alat bukti P. 2 atau mematahkan alat bukti formal dari pihak lawan. Sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon seharusnya menjadi cacat

sebagaimana dalil yang dipertahankan oleh Tergugat/Pemohon dalam perlawannya.

Tetapi terhadap cacatnya perkawinan yang kedua ini, seharusnya diajukan permohonan pembatalan perkawinan, sebagaimana ditentukan menurut Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber hukum dalam praktek Pengadilan Agama di Indonesia.

Akan tetapi, pembatalan perkawinan dengan antara Penggugat/Termohon dengan Tergugat/Pemohon tidak ada diajukan terutama oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan sebagaimana ditentukan pada Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Artinya, sepanjang tidak ada pembatalan, maka perkawinan antara Penggugat/Termohon dengan Tergugat/Pemohon harus dinyatakan tetap sah, meskipun menurut peraturan perundang-undangan telah cacat dari segi materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 40 dan Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Memang dalam kasus ini konsekuensi hukumnya sangat rancu, dimana sampai terjadinya perceraian dengan suami kedua, dalam hal ini dengan Tergugat/Pemohon, akan tetapi perkawinan dengan suami pertama justru belum berakhir.

Selanjutnya, tentang dokumen tertulis yang tidak bertanda tangan seperti surat, pengakuan utang, faktur belanja dan sebagainya maka statusnya sama dengan dokumen yang bertanda tangan, yaitu membutuhkan penetapan bahwa orang tersebut yang menulis atau memerintahkan menulis atau mendiktekan tulisan tersebut.

Dokumen yang dianggap valid yang menjadi alat bukti hanya diterima jika dihadirkan di pengadilan. Jika tidak mampu menghadirkan dokumen yang dijadikan bukti tersebut maka ia dianggap tidak ada.

Alat-alat bukti dalam hukum Islam di atas dihubungkan dengan sistem pembuktian di Pengadilan Agama di Indonesia terdapat sedikit perbedaan. Adapun alat bukti dalam hukum Islam sebagaimana telah disinggung di atas yang disepakati oleh mazhab-mazhab, yakni : sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, *qasamah*, *bayyinah*, ilmu *qadhi* dan petunjuk-petunjuk.³⁶ Sedangkan menurut hukum acara perdata yang biasa dipergunakan pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia, ada 5 (lima) macam alat-alat bukti yang dapat dijadikan bukti, yaitu: alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti pengakuan, alat bukti persangkaan, dan alat bukti sumpah.

Selanjutnya, berdasarkan analisis alat-alat bukti dalam hukum Islam di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem pembuktian dalam hukum Islam juga tidak berdasarkan kebenaran formal. Contohnya penggunaan alat bukti sumpah, selain dari sumpah *li'an* dan sumpah pemutus, alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti dapat diandalkan untuk pengambilan putusan terakhir. Begitu juga alat bukti saksi yang secara formal dapat diajukan ke persidangan, namun keterangannya tidak bersifat mengikat hakim, tetapi

³⁶Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam...Op.Cit.*, h. 100-101.

terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak, artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi secara materiil.³⁷

Selanjutnya alat bukti pengakuan meskipun salah satu pihak dipersidangan memberikan pengakuan secara formal, namun hakim tidak boleh serta merta menerima pengakuan itu hingga ia yakin bahwa pengakuan tersebut lahir dari kesadaran orang tersebut.

Begitu juga, alat bukti surat yang secara lahiriah dapat rekayasa oleh pihak yang berperkara, akan tetapi secara syariah pelaku tindakan tersebut diancam dengan azab neraka. Rasulullah saw. Bersabda:

“Sesungguhnya kalian berselisih dihadapanku dan boleh jadi sebagian dari kalian lebih fasih dalam berargumentasi dari yang lain sehingga saya memutuskan berdasarkan apa yang saya dengar darinya. Siapa yang saya berikan padanya hak saudaranya maka janganlah ia mengambilnya karena sesungguhnya saya telah memberikan untuknya bagian dari neraka”.³⁸

Berdasarkan hal di atas, menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam perkara perdata dalam hukum Islam juga tidak mendasarkan kepada kebenaran formal tetapi lebih menekankan kepada kebenaran materiil. Keadaan ini sangat berbeda dengan yang terjadi dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru.

Meskipun perceraian dengan suami pertama tidak pernah diputuskan melalui Pengadilan Agama sebagaimana didalilkan oleh Pemohon berikut bukti-bukti

³⁷R. Subekti, *Pokok-pokok...Loc.Cit.*

³⁸HR al-Bukhari-Muslim dalam Machfuddin Aladip, dkk, *Bidang Studi...Op.Cit.*, h. 76.

surat yang diajukannya, namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa alat bukti T. 3 sampai dengan bukti T. 12 dipandang tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon.

Padahal dilihat dari segi syarat formil dan materil kedua alat bukti di atas, telah terpenuhi. Dimana alat bukti T.11 tersebut merupakan akta bukti surat otentik dan sebagai akta otentik yang diajukan jelas memenuhi syarat materil dan formil dan bukti lawan yang dikemukakan tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).³⁹ Keadaan ini sejalan dengan ketentuan hukum Islam dimana dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah dalam hal seperti surat nikah langsung dapat dijadikan sebagai bukti.

Apalagi Termohon tidak dapat mematahkan alat bukti tersebut dengan bukti lawan yang rupa setara dan sempurna. Oleh karena itu, bila dilihat dari alat bukti yang diajukan Tergugat/Pemohon secara formal dan materiil cukup untuk mengoyahkan alat bukti P. 2 atau mematahkan alat bukti formal dari pihak lawan. Sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon seharusnya menjadi cacat sebagaimana dalil yang dipertahankan oleh Tergugat/Pemohon dalam perlawannya.

Memang, kelemahan dari dalil Tergugat/Pemohon bukan dari alat bukti yang diajukannya, melainkan dalil itu tidak tepat dipertahankan dalam perkara aqou. Mengapa? sebab untuk menyatakan perkawinannya tidak sah atau cacat hukum

³⁹*Ibid*, hal. 545.

menurut hukum yang berlaku di Indonesia harus diajukan pembatalan perkawinan dan terpisah dari perkara yang sedang disengketakan. Dengan demikian sepanjang tidak ada pembatalan, maka perkawinan antara Penggugat/Termohon dengan Tergugat/Pemohon dapat dinyatakan tetap sah, meskipun bila dilihat dari segi materinya terdapat unsur yang membuatnya cacat. Dengan demikian meskipun sistem pembuktian yang diterapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR tidak menerapkan sistem pembuktian secara materiil sebagaimana telah diupayakan oleh Tergugat/Pemohon dengan mengemukakan dalil dan alat bukti guna mematahkan alat bukti formal lawan. Sama artinya dalil dan alat bukti yang diajukan Tergugat/Pemohon dipandang tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon. Karena yang tepat adalah pembatalan perkawinan sebagaimana telah di kemukakan.

Putusan dari perkara cerai gugat ini sungguh rancu dan merusak tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, bagaimana tidak seseorang yang telah menikah untuk kedua kali, sedangkan pernikahannya yang kedua telah dinyatakan berakhir karena perceraian, akan tetapi perkawinan dengan suami pertama justru belum berakhir, karena tidak pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi, menurut hukum Islam belum tentu rancu. Sebab bagi orang Islam, perceraian

lebih dikenal dengan istilah talak, dan talak tersebut menurut hukum Islam di klasifikasikan, sebagai berikut:⁴⁰

1. Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu li'an, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam;
2. Talak yang terjadi tanpa putusan hakim yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik *sharih* maupun *kinayah* dan *'ila*;
3. Fasakh yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh dengan sebab salah satu pihak dalam keadaan gila, tidak *sekufu*, kurangnya mas kawin dari *mahar mitsil* dan salah satu pihak menolak masuk Islam;
4. Fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan hakim, yaitu fasakh dengan sebab merdekanya isteri, ada hubungan semenda antara suami isteri dan nikahnya fasid sejak semula .

Memperhatikan klasifikasi talak di atas, maka jelaslah karena perceraian tidak harus diputuskan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan pada poin 2 di bahwa talak bisa terjadi tanpa putusan hakim, yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik *sharih* maupun *kinayah* dan *'ila*.

⁴⁰Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta, Nomor 52 Th XII, 2001, h. 7.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR adalah sistem pembuktian secara formal. Dimana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan dengan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti formal semata. Sedangkan sistem pembuktian secara materiil sama sekali tidak diterapkan. Padahal dalam dalil dan petitum Tergugat/Pemohon mengajukan dalil-dalil dan petitum yang maksudnya adalah untuk mematahkan alat bukti formal lawan yakni bukti surat P.1 dan P. 2 sebagai bentuk bantahan yang bersifat materiil, yakni untuk mematahkan kebenaran isi dari alat bukti formal lawan. Seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini dalam memutuskan perkara tidak hanya memutuskan atas dasar kebenaran alat bukti formal. Padahal dalam putusan Mahkamah Agung No. 3136K/Pdt.1983 dikatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Dalam pandangan ahli juga demikian sebagaimana dikemukakan Roihan A Rasyid, “sistem pembuktian yang mendasarkan pada kebenaran formal itu sudah lama ditinggalkan karena keperluan hukum dan praktik penyelenggaraan peradilan dan aliran kebenaran formal juga sudah beralih kepada kebenaran materiil, artinya walaupun alat bukti secara formal telah mencukupi, hakim tidak boleh

memutuskan kalau tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara materiil.

2. Pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR dapat dikatakan tidak cukup pertimbangan karena tidak ada analisis yang jelas berdasarkan hukum pembuktian, diantaranya apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, dan sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. Menurut M. Yahya Harahap putusan yang tidak cukup pertimbangan bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBg dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama. Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972 juga menegaskan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka putusan tersebut dapat dibatalkan.
3. Analisis hukum Islam tentang pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR, berdasarkan analisis alat-alat bukti dalam

hukum Islam dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem pembuktian dalam hukum Islam juga tidak berdasarkan kebenaran formal. Pembuktian perkara perdata menurut hukum Islam lebih menekankan kepada kebenaran materiil. Keadaan ini sangat berbeda dengan yang terjadi dalam perkara cerai gugat No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Meskipun perceraian dengan suami pertama tidak pernah diputuskan melalui Pengadilan Agama sebagaimana didalilkan oleh Pemohon berikut bukti-bukti surat yang diajukannya, namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa alat bukti T. 3 sampai dengan bukti T. 12 dipandang tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon. Padahal dilihat dari segi syarat formil dan materil kedua alat bukti itu, telah terpenuhi. Dimana alat bukti T.11 tersebut merupakan akta bukti surat otentik yang dikeluarkan pemerintah. Keadaan ini sejalan dengan ketentuan hukum Islam dimana dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah dalam hal seperti surat nikah langsung dapat dijadikan sebagai bukti. Apalagi Termohon tidak dapat mematahkan alat bukti tersebut dengan bukti lawan yang rupa setara dan sempurna. Oleh karena itu, bila dilihat dari alat bukti yang diajukan Tergugat/Pemohon secara formal dan materiil cukup untuk mengoyahkan alat bukti P. 2 atau mematahkan alat bukti formal dari pihak lawan. Sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon seharusnya menjadi cacat sebagaimana dalil yang dipertahankan oleh Tergugat/Pemohon dalam

perlawanannya. Memang, kelemahan dari dalil Tergugat/Pemohon bukan dari alat bukti yang diajukannya, melainkan dalil itu tidak tepat dipertahankan dalam perkara aqou. Mengapa? sebab untuk menyatakan perkawinannya tidak sah atau cacat hukum menurut hukum yang berlaku di Indonesia harus diajukan pembatalan perkawinan dan terpisah dari perkara yang sedang disengketakan. Dengan demikian sepanjang tidak ada pembatalan, maka perkawinan antara Penggugat/Termohon dengan Tergugat/Pemohon dapat dinyatakan tetap sah, meskipun bila dilihat dari segi materinya terdapat unsur yang membuatnya cacat. Dengan demikian meskipun sistem pembuktian yang diterapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 0735/PDT.G/2008/PA/PBR tidak menerapkan sistem pembuktian secara materiil sebagaimana telah diupayakan oleh Tergugat/Pemohon dengan mengemukakan dalil dan alat bukti guna mematahkan alat bukti formal lawan. Sama artinya dalil dan alat bukti yang diajukan Tergugat/Pemohon dipandang tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon. Karena yang tepat adalah pembatalan perkawinan sebagaimana telah dikemukakan. Putusan dari perkara cerai gugat ini sungguh rancu dan merusak tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, bagaimana tidak seseorang yang telah menikah untuk kedua kali, sedangkan pernikahannya yang kedua telah dinyatakan berakhir karena perceraian, akan tetapi perkawinan dengan suami pertama justru belum berakhir, karena tidak pernah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi, menurut hukum Islam belum tentu rancu. Karena menurut hukum

Islam perceraian bisa terjadi tanpa putusan hakim, yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik *sharih* maupun *kinayah* dan *'ila*.

B. Saran

1. Meskipun dalam proses peradilan perdata bukan mencari kebenaran yang absolut tetapi mencari kebenaran yang relatif, tetapi tetap harus menghindari dari segala bentuk kelemahan. Karena pembuktian yang hanya berdasarkan kebenaran alat bukti formal para pihak yang berpekara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara cerai gugat menerapkan sistem pembuktian secara materiil, terutama jika hakim tidak begitu yakin dengan alat bukti formal yang diajukan para pihak. Terlebih lagi bilamana dari alat bukti formal yang diajukan, para pihak justru ada mengajukan bantahan terhadap alat bukti formal tersebut.
2. Agar pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dapat cukup pertimbangannya, maka penulis menyarankan agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut secara seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, diantaranya apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti; dan sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

3. Berkaitan dengan analisis hukum Islam tentang pelaksanaan sistem pembuktian di Pengadilan Agama, maka sekalipun menurut HIR/RBg yang saat ini sebagai sumber hukum acara di Pengadilan Agama di Indonesia sudah dianggap cukup, namun sebaiknya hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin benar secara materiil menurut hukum Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Manan, Prof. DR. MA, *Penerapan Hukum Islam Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. ke-4.
- , *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta, Nomor 52 Th XII, 2001, h. 7.
- dan M. Fauzan DR, SH, MA, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Depag RI Pelita III Tahun III, 1983-1984).
- Effendi Siregar dkk (tim penyusun), *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, Pekanbaru, 2007.
- Fauzan, DR, SH, MA, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005).
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Hari Sasangka, SH, *Hukum Pembuktian dalam Berperkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), Cet. ke-1.
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Lomba Sultan dan Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Lintasan Syari'ah*, (Makassar : tp. 2001).
- Machfuddin Aladip dkk, *Bidang Studi Al-Qur'an -Hadist*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1983), Cet.ke-3.
- M. Yahya Harahap, SH *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2006), Cet. ke- 4.

Munir Fuady, DR. LLM, SH, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006,) Cet. ke-1.

Roihan A Rasyid, DR. MA, SH, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. ke-3.

R. Sarjono, SH dalam Hari Sasangka, SH, *Hukum Pembuktian dalam Berperkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), Cet. ke-1.

R. Soepomo, Prof. SH, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), Cet. ke-8.

R. Subekti, Prof, SH, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), Cet. ke-6.

-----, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1992), Cet. ke-4.

R. Subekti, Prof, SH, R. Tjitrosudibio, SH, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata edisi Revisi dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), Cet. ke-10.

Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah, Jilid 3*, (Jakarta: al Maktabah al Khadimat al Haditsah, 1989).

Sudikno Mertokusumo, SH, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1993), Edisi ke-4.

Salinan Putusan Verstek Pengadilan Agama Pekanbaru Perkara No. 0735/Pdt.G/2008/PA/PBR.

Salinan Putusan Verzet Pengadilan Agama Pekanbaru Perkara No. 0735/Pdt.G/2008/PA/PBR.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.